



DINAMIKA STRUKTURAL FUNGSIONAL IDENTITAS MUSLIM-MELAYU PADA MASYARAKAT PATTANI DI THAILAND SELATAN

Marini Kristina Situmeang, Rusnawati

Prodi Pengembangan Masyarakat Islam,

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika struktural-fungsional pada masyarakat Pattani, Thailand Selatan, dalam upayanya mempertahankan identitas Muslim-Melayu di tengah agresi dan kebijakan asimilasi budaya (siamisasi) yang dilakukan secara berkepanjangan oleh pemerintah Thailand. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-eksploratif. Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam bersama informan kunci, informan utama, dan informan pendukung, sementara data sekunder diperoleh dari studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan mengacu pada kerangka AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency) yang dikembangkan Talcott Parsons. Hasil penelitian menunjukkan bahwa identitas Muslim-Melayu Pattani ditopang oleh struktur sosial-budaya yang kuat, meliputi bahasa Melayu (kecek nayu), tulisan Jawi, hukum yang bersumber pada kitab fikih, sistem pendidikan pondok, serta peran ulama (Tok Guru). Kebijakan integrasi Thailand melalui jalur pendidikan, politik, budaya, dan hukum telah menimbulkan tekanan struktural yang memicu disfungsi sosial berupa marginalisasi, diskriminasi, dan konflik berkepanjangan. Meskipun demikian, masyarakat Pattani menunjukkan kapasitas adaptif melalui reproduksi nilai lintas generasi, penguatan jaringan solidaritas komunitas, serta partisipasi generasi muda dalam ruang-ruang baru pendidikan, ekonomi, dan advokasi damai, sehingga struktur identitas Muslim-Melayu tetap bertahan sebagai mekanisme resistensi kultural terhadap tekanan homogenisasi negara.

Kata Kunci: Dinamika Struktural-Fungsional, Identitas, Muslim-Melayu, Pattani.

PENDAHULUAN

Dinamika sosial Pattani beserta masyarakatnya yang identik dengan Muslim-Melayu selalu menarik untuk dikaji dari berbagai perspektif. Sebagai salah satu dari empat provinsi di kawasan perbatasan selatan Thailand, Pattani memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan wilayah Thailand lainnya (Aphornsuvan, 2003). Mayoritas masyarakat Thailand menganut agama Buddha aliran Theravada yang juga berkedudukan sebagai agama resmi negara, sementara Islam dan Konghucu merupakan agama minoritas dengan populasi kurang dari lima persen dari keseluruhan penduduk Thailand (Kusuma, 2016).

Sebagai kelompok minoritas, masyarakat Muslim-Melayu di Thailand memiliki jejak historis yang panjang. Pada mulanya Pattani merupakan Kesultanan Islam yang independen dan berdaulat, bahkan sempat mengalami masa kejayaan di bawah kepemimpinan empat orang ratu pada abad ke-16 dan ke-17. Namun sejak dianeksasi oleh Kerajaan Siam yang kemudian bermetamorfosis menjadi Thailand dengan sistem monarki konstitusional pada tahun 1932, Pattani berada di bawah pengawasan dan kekuasaan pemerintah pusat Thailand. Identitas Pattani yang terbentuk dari asimilasi antara ajaran Islam dan budaya Melayu berhadapan langsung dengan identitas Thai-Buddhis yang dipegang oleh mayoritas penduduk Thailand, sehingga secara fundamental terdapat perbedaan sosio-kultural yang sulit diintegrasikan (Sodiqin, 2016).

Secara historis, kebijakan asimilasi yang dikenal dengan istilah "siamisasi" telah membawa perubahan besar dalam sistem dan struktur sosial masyarakat Pattani. Upaya pengaburan identitas Muslim-Melayu melalui kebijakan tersebut dinilai oleh masyarakat Pattani sebagai upaya negara untuk melemahkan etnisitas dan

budaya Melayu-Islam (Sodiqin, 2016). Akibat kebijakan ini, masyarakat Muslim Melayu yang semula menjadi kelompok mayoritas di wilayahnya sendiri berubah kedudukan menjadi minoritas di dalam kekuasaan Siam, bahkan mendapat sebutan "*khaek*" yang bermakna pendatang atau orang asing (Kusuma, 2016).

Proses integrasi hingga kini masih menyisakan ketegangan antara identitas nasional yang dikonstruksikan Thailand yang menekankan budaya Thai, agama Buddha, dan bahasa Thai dengan identitas etno-religius Muslim-Melayu yang telah mengakar sejak berabad-abad silam. Upaya integrasi budaya dan ideologi Thai-Buddhis terus dilakukan pemerintah melalui empat jalur utama, yaitu pendidikan, politik, budaya, dan hukum (Yusuf, 2009). Dalam bidang pendidikan, pemerintah menetapkan sistem pendidikan nasional yang mewajibkan penggunaan bahasa Thai serta memasukkan muatan ajaran Buddha, sehingga ruang bagi pembelajaran Islam secara mendalam semakin menyempit sejak kebijakan siamisasi diberlakukan (Sarkar, 2014).

Dari perspektif struktural-fungsional, masyarakat Muslim-Melayu Pattani berupaya mempertahankan struktur sosial dan budaya Islam mereka, seperti peran ulama, sistem pendidikan pondok (pesantren tradisional), hukum yang bersumber pada kitab fikih, serta adat istiadat Melayu. Struktur-struktur tersebut berfungsi sebagai pilar identitas kolektif yang memberi stabilitas dan makna dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus menjadi mekanisme resistensi terhadap tekanan asimilasi negara (Setiarini et al., 2021). Namun demikian, dinamika modernitas, kebijakan sentralisasi pemerintahan, serta konflik bersenjata yang berakar pada ketidakpuasan terhadap diskriminasi struktural telah mengubah peran dan fungsi institusi-institusi tradisional tersebut. Banyak lembaga pendidikan

Islam yang harus beradaptasi dengan kurikulum nasional, sementara peran tokoh agama mulai bersinggungan dengan gerakan politik maupun dinamika kekerasan identitas (Walker, 2005).

Di sisi lain, komunitas ini juga menunjukkan dinamika adaptif. Kelompok masyarakat sipil, aktivis, dan generasi muda Muslim mulai menavigasi ruang-ruang baru dalam pendidikan, media, dan ekonomi untuk memperjuangkan identitas dan hak-hak mereka melalui cara yang lebih damai dan strategis. Transformasi ini menunjukkan bahwa struktur sosial masyarakat Muslim-Melayu tidak bersifat statis, melainkan terus beradaptasi dalam kerangka hubungan yang kompleks dengan negara.

Kajian ini menjadi penting karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap bagaimana struktur sosial beradaptasi dalam konteks tekanan politik dan kultural yang kuat, sekaligus mengisi kekosongan kajian sosiologi minoritas dan etnopolitik di Asia Tenggara yang memfokuskan diri pada pendekatan struktural-fungsional. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana dinamika struktural-fungsional identitas Muslim-Melayu berlangsung pada masyarakat Pattani Thailand Selatan di tengah tekanan asimilasi negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-eksploratif. Sumber data primer diperoleh melalui realitas sosial yang tampak dari gejala sosial yang sesungguhnya terjadi beserta implikasinya terhadap interaksi dan hubungan sosial yang berlangsung di lapangan (Creswell, 2015). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber informasi seperti buku,

artikel jurnal, dan sumber elektronik yang relevan. Objek kajian dalam penelitian ini adalah dinamika struktural-fungsional identitas Muslim-Melayu dalam konteks sosial, budaya, dan keagamaan, sedangkan subjeknya adalah masyarakat Muslim-Melayu yang bermukim di wilayah Pattani dan beberapa kawasan Thailand Selatan lainnya.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur bersifat open-ended (berfokus pada kedalaman informasi) bersama informan kunci, informan utama, dan informan pendukung. Informan kunci adalah salah seorang pejuang otonomi Thailand Selatan yang tergabung dalam gerakan masyarakat sipil Pattani. Informan utama adalah beberapa warga masyarakat Pattani, sedangkan informan pendukung berasal dari pihak Konsulat Republik Indonesia di Songkhla dan Persait (Persatuan Alumni Indonesia-Thailand). Observasi lapangan dilakukan di kawasan Yarang, Pattani pada Juni-Juli 2023. Analisis data dilakukan melalui triangulasi sumber data kualitatif dengan model analisis deskriptif-eksploratif, kemudian ditelaah menggunakan kerangka fungsionalisme struktural AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency*) yang dikembangkan oleh Talcott Parsons untuk memahami bagaimana struktur sosial masyarakat Pattani menjalankan fungsinya dalam mempertahankan identitas kolektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jejak Historis dan Konstruksi Identitas Muslim-Melayu Pattani

Identitas Muslim-Melayu Pattani terbentuk dari asimilasi antara ajaran Islam dan budaya Melayu yang menyatu secara utuh, sehingga kesempurnaan sebagai seorang Muslim di kalangan masyarakat Pattani dimaknai pula sebagai kesempurnaan menjadi Melayu

(Sodiqin, 2016). Perpaduan religiusitas dan etnisitas ini membentuk apa yang disebut sebagai ethno-religious-nationalism, yang kemudian menjadi landasan bagi masyarakat Pattani untuk terus mempertahankan diri dari pengaruh budaya luar, termasuk budaya Siam yang disokong penuh oleh pemerintah Thailand (Sodiqin, 2016). Karakter asli Muslim-Melayu Pattani sesungguhnya tidak bersifat radikal dan cenderung toleran terhadap perbedaan adat maupun tradisi lain, tetapi karakter tersebut dapat berubah menjadi militan tatkala eksistensi kebudayaannya terancam. Sebagaimana ditegaskan (Eriksen, 1993), etnisitas bukanlah properti tetap yang melekat secara alamiah pada suatu kelompok, melainkan aspek dinamis dari relasi sosial yang menguat justru ketika berhadapan dengan kelompok lain yang berbeda; karakter militan Muslim-Melayu Pattani dengan demikian dapat dipahami sebagai respons relasional terhadap tekanan identitas Thai-Buddhis, bukan sebagai sifat bawaan yang statis.

Menurut (Chonlaworn, 2014), sejak masa Kesultanan, hukum Islam berlaku secara menyeluruh di Pattani, tidak hanya pada persoalan perdata (keluarga) tetapi juga pidana. Ketika kekuasaan Siam mengambil alih Pattani pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, terjadi serangkaian intervensi hukum, administrasi, dan pendidikan yang secara bertahap mempersempit ruang berlakunya identitas Muslim-Melayu, mulai dari penghapusan jabatan Sultan dan qadi, penyatuan peradilan Islam ke dalam peradilan sipil, hingga pembatasan hukum Islam hanya pada wilayah hukum keluarga dan kewarisan (Dorloh, 2009).

Struktur Sosial-Budaya sebagai Pilar Identitas

Merujuk pada gagasan (Barth, 1969) tentang batas etnis (ethnic

boundary), identitas suatu kelompok tidak semata ditentukan oleh isi kebudayaan yang dimilikinya, melainkan oleh batas yang dijaga secara aktif untuk membedakan diri dari kelompok lain. Batas inilah yang oleh masyarakat Pattani terus direproduksi melalui simbol bahasa, hukum, dan pendidikan agar identitas Muslim-Melayu tetap terjaga di tengah kepungan identitas Thai-Buddhis. Reproduksi batas identitas tersebut sejalan dengan pandangan (Berger & Luckmann, 1966) bahwa realitas sosial, termasuk identitas kolektif, dibentuk dan dilembagakan melalui proses interaksi serta pewarisan makna yang terus-menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dalam perspektif struktural-fungsional, identitas Muslim-Melayu Pattani ditopang oleh sejumlah struktur sosial-budaya yang saling terkait dan berfungsi menjaga stabilitas kolektif. Pertama, bahasa Melayu yang dikenal dengan sebutan kecek nayu menjadi penanda identitas utama, digunakan berdampingan dengan bahasa kampong dalam percakapan sehari-hari dan bahasa tengoh pada forum-forum formal maupun khutbah (Setiarini et al., 2021). Kedua, tulisan Jawi aksara Arab yang digunakan untuk menuliskan bahasa Melayu tetap dipertahankan sebagai simbol identitas tertulis, meskipun pemerintah Thailand pernah berupaya menggantikannya dengan aksara Thai.

Ketiga, hukum yang bersumber pada kitab-kitab fikih mazhab Syafi'iyah, seperti Fath al-Mu'in, Mughni al-Muhtaj, dan Ghāyat al-Maqsūd, tetap menjadi rujukan dalam menyelesaikan persoalan keluarga di kalangan Muslim-Melayu, meskipun kewenangannya telah dibatasi oleh negara (Dorloh, 2009; Sodiqin, 2016). Keempat, struktur pendidikan berjenjang mulai dari sekolah anubhan, raudhoh, dan tadika di tingkat dasar, hingga pondok pesantren yang dipimpin oleh Tok Guru dan dibantu para Tahliyat, berperan sebagai center of gravity dalam

transmisi pengetahuan agama sekaligus penjaga identitas etnis Melayu dari sisi bahasa, sejarah, dan budaya (Setiarini, Misbah, & Mawardi, 2021).

Kelima, pengelompokan sosial-keagamaan antara golongan abangan (menekankan praktik dan ritual) dan santri (memiliki penguasaan ilmu agama yang mendalam) turut membentuk struktur sosial internal masyarakat Pattani, yang di dalamnya juga terdapat keyakinan sinkretis warisan tradisi pra-Islam (Sarkar, 2014, dalam Setiarini, Misbah, & Mawardi, 2021). Keenam, busana adat baju kurung yang dipadukan dengan jilbab menjadi penanda identitas visual sehari-hari masyarakat Muslim-Melayu. Keseluruhan struktur tersebut saling menopang dan berfungsi sebagai mekanisme reproduksi identitas kolektif lintas generasi, sekaligus benteng resistensi kultural terhadap tekanan homogenisasi dari negara.

Kebijakan Asimilasi Negara dan Tekanan terhadap Struktur Identitas

Pemerintah Thailand, terutama sejak rezim Jenderal Phibul Songkhram, menempuh kebijakan asimilasi budaya secara sistematis melalui empat jalur. Pada jalur pendidikan, sekolah negeri diwajibkan mengajarkan bahasa dan sejarah Thai serta ajaran Buddha, sementara lembaga pendidikan tradisional yang tidak mengikuti kurikulum pemerintah tidak diakui ijazahnya sehingga lulusannya tidak dapat menjadi pegawai negeri (Sarkar, 2014). Berdasarkan observasi awal peneliti di Yarang, Pattani pada Juli 2023, kondisi bangunan sekolah di sejumlah kawasan pinggiran masih jauh dari kata layak, mencerminkan kesenjangan pembangunan pendidikan antara wilayah selatan dan wilayah lain di Thailand.

Pada jalur politik, integrasi dilakukan melalui sentralisasi

administrasi pemerintahan (Neelapaijit, 2009). Observasi awal peneliti pada Juni 2023 menunjukkan bahwa kantor-kantor pemerintah di wilayah Pattani diurus dan ditentukan oleh pemerintah pusat, sehingga masyarakat Pattani tidak memiliki keleluasaan menjalankan pemerintahannya sendiri. Kondisi ini turut berdampak pada rendahnya minat masyarakat Pattani untuk bekerja di instansi pemerintah dan lebih memilih berdagang atau berkebun, yang pada gilirannya membatasi akses mereka terhadap pelayanan administrasi dan kebutuhan fungsional lainnya.

Pada jalur budaya, ideologi "*nation, king, religion*" yang dikembangkan pemerintah Thailand mendorong migrasi penduduk Thailand Utara yang beragama Buddha ke wilayah Selatan (Sodiqin, 2016). Dari hasil wawancara awal peneliti pada Juni 2023, ditemukan fakta bahwa aktivitas yang dianggap menyimpang dari nilai dan norma Muslim-Melayu, seperti pergaulan bebas, konsumsi minuman keras di kalangan remaja, cara berpakaian yang tidak sesuai syariat, hingga perselingkuhan, kini semakin mudah dijumpai di kawasan Pattani. Bagi mayoritas masyarakat Buddha, hal tersebut dianggap wajar sebagai bagian dari kebebasan individu, tetapi bagi masyarakat Muslim-Melayu kondisi ini dipandang sebagai ancaman nyata terhadap eksistensi nilai, tradisi, dan agama mereka.

Pada jalur hukum, sistem hukum Siam mengubah kewenangan para kali (hakim agama) sekaligus membatasi berlakunya hukum Islam. Chonlaworn (2014) menjelaskan bahwa hukum Islam dibatasi hanya berlaku untuk persoalan hukum keluarga meliputi nikah, talak, dan kewarisan sementara seluruh perkara pidana dan perdata lainnya tunduk pada hukum sipil Thailand. Meskipun hukum Islam masih diberlakukan pada ranah terbatas

tersebut, keputusannya tetap harus diratifikasi oleh komisioner wilayah agar memiliki kekuatan hukum, yang oleh masyarakat Pattani dinilai sebagai bentuk pelemahan sistematis terhadap karakteristik keislaman di wilayah mereka (Chonlaworn, 2014).

Dinamika Fungsional dalam Kerangka AGIL Talcott Parsons

Talcott Parsons (1951) dalam (Soekanto, 1986) mengaitkan fungsi sosial sebagai segala bentuk kegiatan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan suatu sistem sosial, yang mencakup empat prasyarat fungsional agar sistem tetap stabil, yaitu *Adaptation*, *Goal Attainment*, *Integration*, dan *Latency*. Keempat unsur ini bersifat saling berhubungan dan saling memengaruhi dalam menjaga keberlangsungan sistem sosial masyarakat Pattani di tengah tekanan asimilasi (Parsons, 1951). Sejalan dengan itu, (Merton, 1968) mengingatkan pentingnya membedakan fungsi manifes (yang disadari dan dikehendaki) dengan fungsi laten (yang tidak disadari namun tetap menopang sistem); dalam konteks Pattani, pendidikan pondok misalnya secara manifes berfungsi menanamkan ilmu agama, tetapi secara laten juga berfungsi merawat kohesi etnis dan bahasa Melayu yang justru menjadi sumber resistensi terhadap negara.

Adaptasi (*Adaptation*) tampak dari kemampuan struktur pendidikan Islam Pattani menyesuaikan diri dengan tekanan kebijakan negara tanpa sepenuhnya kehilangan muatan keislamannya. Ketika lembaga pendidikan tradisional tidak diakui negara, banyak keluarga Muslim-Melayu mengirimkan anaknya melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah, India, Malaysia, maupun Indonesia (Setiari, Misbah, & Mawardi, 2021). Di sisi lain, sebagian keluarga memilih strategi adaptif dengan menempuh pendidikan

hybrid, yakni mengikuti sekolah pemerintah sekaligus pendidikan agama di pondok atau madrasah pada sore hari, sehingga muncul tipologi baru Muslim tradisional, Muslim modern, dan Muslim hybrid di tengah masyarakat Pattani.

Pencapaian tujuan (*Goal Attainment*) tercermin dari mobilisasi sumber daya dan kepemimpinan kolektif masyarakat Pattani dalam memperjuangkan otonomi dan pengakuan identitas. Perjuangan Haji Sulong Abdul Qadir yang mengajukan tujuh tuntutan otonomi kepada pemerintah Thailand pada tahun 1948 menjadi tonggak penting kesadaran kolektif ini, yang kemudian dilanjutkan oleh berbagai organisasi seperti Barisan Nasional Pembebasan Pattani, Barisan Revolusi Nasional (BRN), dan Pattani *United Liberation Organization* (PULO) (Sodiqin, 2016). Tujuan kolektif ini tidak selalu berwujud perlawanan bersenjata, tetapi juga termuat dalam upaya damai generasi muda dan kelompok masyarakat sipil untuk memperoleh pengakuan hak-hak sosial, ekonomi, dan pendidikan secara setara.

Integrasi (*Integration*) terlihat dari kohesivitas jaringan sosial yang dibangun melalui figur ulama (Tok Guru), jaringan pondok pesantren, serta mekanisme penyelesaian sengketa secara tradisional. Sebelum sepenuhnya tunduk pada sistem hukum Thailand, masyarakat Pattani terbiasa menyelesaikan persoalan melalui sumpah, mediasi tetua adat, dan yurisdiksi informal pemimpin lokal (Chonlaworn, 2014). Pola-pola integrasi berbasis kekerabatan dan otoritas keagamaan inilah yang menjadi perekat solidaritas sosial masyarakat Pattani di tengah tekanan eksternal yang kuat.

Pemeliharaan pola (*Latency*) berlangsung melalui reproduksi nilai, bahasa, dan hukum fikih secara lintas generasi. Penggunaan bahasa Jawi dan kecek nayu dalam kehidupan sehari-hari,

penolakan terhadap penggantian aksara Thai, serta konsistensi pengajaran kitab-kitab fikih klasik di pondok pesantren menjadi wujud nyata dari fungsi pemeliharaan pola ini (Setiarini, Misbah, & Mawardi, 2021). Sekalipun terdapat diferensiasi tipologi masyarakat akibat kebijakan asimilasi, nilai-nilai inti keislaman dan kemelayuan tetap dipertahankan sebagai rujukan bersama yang menyatukan seluruh lapisan masyarakat Pattani. Hal ini sejalan dengan tesis (Rafiqah, 2018) bahwa hukum Islam, ketika dianalisis melalui pendekatan struktural-fungsional, senantiasa menjalankan fungsi pemeliharaan pola (latency) dengan menjaga sistem nilai tetap hidup dan diwariskan meskipun ruang berlakunya dibatasi secara formal oleh negara.

Disfungsi Sosial: Konflik, Diskriminasi, dan Dampak Psikologis

Ketidaksesuaian antara struktur sosial tradisional Muslim-Melayu dan kebijakan negara yang homogen menciptakan disfungsi sosial dalam berbagai bentuk. Kusuma (2016) menyebut kebijakan asimilasi budaya sebagai bentuk kekerasan kultural dan peperangan psikologis yang melemahkan moral spirit masyarakat Melayu Muslim. Pelarangan penggunaan nama, bahasa, dan identitas Melayu-Islam dalam ruang publik, disertai kewajiban mengadopsi nama dan busana bergaya Thai untuk dapat diterima di sekolah negeri maupun instansi pemerintah, menimbulkan culture shock yang berat dan berkepanjangan (Kusuma, 2016).

Sejak penetapan status darurat militer pada 5 Januari 2004, kehadiran aparat keamanan di tengah masyarakat sipil semakin intensif. Observasi awal peneliti di kawasan Yarang, Pattani pada Juli 2023 menunjukkan operasi militer bersenjata masih dilakukan secara ketat di sejumlah persimpangan jalan pada

malam hari, sebuah pemandangan yang telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat setempat. Kondisi ini, ditambah dengan stigma “khaek” dan tuduhan sebagai kelompok separatis atau kriminal berkedok agama, memperkuat perasaan sebagai warga negara kelas dua di kalangan masyarakat Muslim-Melayu (Kusuma, 2016). Ketimpangan pembangunan ekonomi antara wilayah utara dan selatan turut memperburuk kondisi sosial, sebagaimana tampak dari masih banyaknya masyarakat miskin dan fasilitas pendidikan yang kurang layak di kawasan pinggiran Pattani.

Resiliensi dan Dinamika Adaptif Kontemporer

Dalam istilah (Castells, 1997), apa yang terjadi pada masyarakat Pattani dapat dibaca sebagai pembentukan resistance identity, yaitu identitas kolektif yang dibangun oleh kelompok yang berada pada posisi terdevaluasi atau terstigma oleh logika dominasi negara, sebagai basis pertahanan diri dan sumber makna alternatif di luar narasi resmi yang dipaksakan. Pola resiliensi semacam ini juga tampak pada kelompok minoritas keagamaan lain di Indonesia; (Pahrozi, 2018) misalnya menunjukkan bagaimana komunitas Tionghoa Muslim di Palembang menegosiasikan identitas ganda mereka di tengah pluralitas budaya, sementara (Ali et al., 2022) mendokumentasikan bagaimana Jemaat Ahmadiyah di Banjarnegara memanfaatkan struktur kesempatan politik dan modal sosial untuk bertahan menghadapi diskriminasi. Kedua kasus tersebut memperkuat argumen bahwa kelompok minoritas keagamaan, termasuk Muslim-Melayu Pattani, tidak semata menjadi objek pasif kebijakan negara, melainkan aktor yang secara aktif merancang strategi bertahan dalam batas-batas struktural yang tersedia.

Di tengah tekanan struktural tersebut, masyarakat Pattani tidak sepenuhnya pasif. Sejak tahun 1997, pemerintah Thailand mulai mengakomodasi sejumlah tuntutan Muslim-Melayu, seperti mengizinkan muslimah mengenakan jilbab pada foto resmi, memberikan waktu khusus untuk salat Jumat bagi pegawai laki-laki, memfasilitasi ibadah haji, serta mengakui keberadaan lembaga keislaman seperti Chularajmontri dan Majelis Islam Provinsi (Sodiqin, 2016). Kelompok masyarakat sipil, aktivis perempuan, dan generasi muda Muslim mulai memanfaatkan ruang-ruang baru dalam pendidikan, media, dan ekonomi untuk memperjuangkan identitas dan hak-hak mereka melalui jalur yang lebih damai dan strategis dibandingkan generasi sebelumnya.

Fenomena ini menegaskan bahwa struktur sosial masyarakat Muslim-Melayu Pattani bersifat dinamis, bukan statis. Hal ini sejalan dengan pemikiran (Parsons, 1985) yang menjelaskan bahwa Fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola berjalan secara simultan dan saling mengoreksi satu sama lain, sehingga identitas Muslim-Melayu tetap dapat dipertahankan meskipun dalam tekanan politik dan kultural yang berkepanjangan. Pada akhirnya, dinamika struktural-fungsional ini menunjukkan bahwa ketahanan identitas suatu komunitas minoritas tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan struktur tradisionalnya, melainkan juga oleh kapasitasnya untuk terus bernegosiasi dan beradaptasi dengan kekuatan-kekuatan eksternal yang menekannya.

KESIMPULAN

Dinamika struktural-fungsional identitas Muslim-Melayu pada masyarakat Pattani, Thailand Selatan, menunjukkan bahwa identitas kolektif tersebut dibangun dan dipertahankan

melalui struktur sosial-budaya yang saling menopang, meliputi bahasa Melayu dan tulisan Jawi, hukum yang bersumber pada kitab fikih, sistem pendidikan pondok, peran ulama, serta pola pengelompokan sosial-keagamaan yang khas. Kebijakan asimilasi pemerintah Thailand yang ditempuh melalui jalur pendidikan, politik, budaya, dan hukum telah menekan struktur-struktur tersebut sehingga memunculkan disfungsi sosial berupa marginalisasi, diskriminasi, dan konflik berkepanjangan yang berdampak pada kondisi psikologis masyarakat Muslim-Melayu. Meskipun demikian, dianalisis melalui kerangka AGIL Talcott Parsons, masyarakat Pattani menunjukkan kapasitas fungsional yang tetap berjalan melalui adaptasi pendidikan yang fleksibel, pencapaian tujuan kolektif berupa perjuangan otonomi dan pengakuan hak, integrasi sosial berbasis otoritas keagamaan dan kekerabatan, serta pemeliharaan pola nilai lintas generasi. Dengan demikian, identitas Muslim-Melayu Pattani bukanlah entitas statis yang pasif menghadapi tekanan negara, melainkan sistem sosial yang terus bernegosiasi dan beradaptasi, sehingga tetap bertahan sebagai mekanisme resistensi kultural di tengah upaya homogenisasi nasional yang berkepanjangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Konsulat Republik Indonesia di Songkhla, Persatuan Alumni Indonesia-Thailand (Persait), serta seluruh informan di Pattani yang telah membantu proses pengumpulan data dan berbagi pengalaman selama penelitian ini berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, T. R., Sugiarto, B., & Sabiq, A. (2022). Strategi Bertahan Kelompok Minoritas Agama Menghadapi Diskriminasi: Pengalaman Jemaat

Ahmadiyah Indonesia Banjarnegara Jawa Tengah. *Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 19(2), 146–165.

Aphornsuvan, T. (2003). *History and Politics of the Muslim in Thailand*.

Barth, F. (1969). *Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference*.

Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*.

Castells, M. (1997). *The Power of Identity*.

Chonlaworn, P. (2014). Contesting Law and Order: Legal and Judicial Reform in Southern Thailand in the Late Nineteenth to Early Twentieth Century. *Southeast Asia Studies*, 3(3), 527–548.

Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan Edisi 3*.

Dorloh, S. (2009). The Code of Muslim Family Law and Law of Inheritance (1941) as Applicable in the Provincial Courts of Southern Four Border Provinces of Thailand: Issues and Prospects. *Journal of Fiqh*, 6, 121–148.

Eriksen, T. H. (1993). *Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives*.

Kusuma, B. M. A. (2016). Masyarakat Muslim Thailand dan Dampak Psikologis Kebijakan Asimilasi Budaya. *Jurnal Hisbah*, 13(1), 109–120.

Merton, R. K. (1968). *Social Theory and Social Structure*.

Neelapaijit, A. (2009). *Roles and Challenges for Muslim Women in the Restive Southern Border Provinces of Thailand*.

Pahrozi, R. (2018). Dinamika Pembauran Identitas Tionghoa Muslim di Palembang. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 13(1), 75–91.

Parsons, T. (1951). *The Social System*.

Parsons, T. (1985). *Talcott Parsons on Institutions and Social Evolution: Selected Writings*.

Rafiqah, L. (2018). Pendekatan Struktural Fungsional terhadap Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Himayah*, 2(2), 205–216.

Sarkar, D. (2014). *Religious Minority, Education and Separatism in South Thailand*.

Setiarini, N. I., Misbah, M., & Mawardi, K. (2021). Budaya Muslim Melayu Pattani Thailand Selatan. *Tsaqofah & Tarikh*, 6(1), 24–32.

Sodiqin, A. (2016). Budaya Muslim Pattani (Integrasi, Konflik, dan Dinamikanya). *Jurnal Kebudayaan Islam*, 14(1), 31–49.

Soekanto, S. (1986). *Talcott Parsons: Fungsionalisme Imperatif*.

Walker, D. (2005). Conflict Between the Thai and Islamic Cultures in Southern Thailand (Patani) 1948-2005. *Islamiyyat Universiti Kebangsaan Malaysia*, 27(1), 89–108.

Yusuf, I. (2009). *Ethnoreligious and Political Dimensions of the Southern Thailand Conflict*.